



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Program kegiatan di lingkup BPMPT Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat sebagaimana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Visi dan Misi BPMPT Provinsi Jawa Barat dirumuskan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu visi ***"Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua"***. Sedangkan Misi Jawa Barat yang terkait dengan bidang urusan wajib penanaman modal yaitu ***misi kedua "Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan"***. Tujuan dari misi kedua yaitu "menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat", dengan sasaran yang akan dicapai adalah "meningkatkan kualitas usaha dan iklim investasi". ***Misi ketiga "meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur dan perluasan partisipasi publik"***, dengan tujuan "menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) serta menerapkan model pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis Kabupaten/Kota dengan manajemen lintas Kabupaten/Kota".

A. Visi dan Misi

Memperhatikan Visi dan Misi Jawa Barat, dengan mempertimbangkan potensi dan kondisi permasalahan, tantangan dan hambatan serta peluang yang ada di Jawa Barat, maka dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi BPMPT :

"Menjadi lembaga profesional dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia"



Pengertian dalam visi BPMPT Provinsi Jawa Barat adalah :

- Visi tersebut menunjukkan bahwa BPMPT Provinsi Jawa Barat harus bekerja secara profesional dengan kinerja terbaik yang berdampak pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- Visi tersebut menunjukkan bahwa kinerja profesional BPMPT Provinsi Jawa Barat akan memberikan dampak jangka panjang yaitu mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia bagi para investor.

Visi Organisasi tersebut dicapai melalui 2 (dua) misi yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat;

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;

Faktor-faktor penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi BPMPT Provinsi Jawa Barat :

1. Meningkatkan kinerja aparatur di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional;
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan perizinan yang memadai untuk mencapai SPM sesuai dengan alokasi anggaran;
3. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi peluang investasi dan perizinan kewenangan Provinsi Jawa Barat selain digunakan untuk pemangku kepentingan dan juga digunakan sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian, dan pembinaan oleh OPD teknis terkait di Jawa Barat;
4. Menerapkan prosedur yang jelas dan meningkatkan standar mutu dalam pengelolaan pelayanan penanaman modal dan perizinan guna menciptakan transparansi dan menghindari terjadinya KKN;
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis;
6. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu agar sesuai tuntutan dan kepentingan masyarakat;
7. Meningkatkan pengolahan informasi penanaman modal dan perizinan untuk kepentingan publik.



Kedua misi tersebut memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2018. **Tujuan** merupakan implementasi dari pernyataan misi BPMPT Provinsi Jawa Barat yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan dari kedua misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 1. memiliki tujuan :

Meningkatkan meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat **dengan sasaran :**

- Meningkatnya kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan;
- Meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama investasi untuk menarik minat investasi;
- Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

Misi 2. memiliki tujuan :

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan asas-asas pelayanan publik **dengan sasaran :**

- Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan;
- Meningkatnya kualitas sumber daya organisasi.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dipertegas tentang upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi pembangunan investasi yang akan dilaksanakan selama lima tahun hingga tahun 2018. Strategi pembangunan investasi tersebut terdiri dari kebijakan pembangunan, program pembangunan, dan kegiatan.

Tantangan dalam mempertahankan kinerja pembangunan investasi Jawa Barat kedepan semakin berat, upaya yang dilakukan melalui peningkatan investasi dan peningkatan daya tarik investasi, oleh sebab itu strategi pembangunan investasi dalam periode 2013-2018 diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

- a) Mengembangkan pelayanan penanaman modal dan perizinan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
- b) Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral;



- c) Memberikan layanan informasi potensi, prosedur pelaksanaan penanaman modal dan perizinan kepada publik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
- d) Menjadikan lembaga BPMPT sebagai area kinerja bebas KKN dan gratifikasi;
- e) Melaksanakan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur penanaman modal dan perizinan melalui diklat, seminar, workshop, bimbingan teknis dan lokakarya yang didukung oleh OPD teknis terkait;
- f) Menerapkan pola online system dalam upaya pendekatan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat;
- g) Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui penerapan sertifikasi ISO 9001-2008;
- h) Melaksanakan sinergitas perizinan kewenangan Provinsi dengan OPD teknis terkait dan pemangku kepentingan;
- i) Melaksanakan pemusatan database untuk meningkatkan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan;
- j) Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi pegawai dalam pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- k) Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- l) Memperjelas Tupoksi dari Tim *Task force* Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal sebagai pendukung pelayanan penanaman modal dan Tim Teknis dari OPD terkait sebagai pendukung perizinan terpadu.

Program Pembangunan Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan BPMPT Provinsi Jawa Barat terdapat empat urusan wajib yaitu urusan wajib antara lain di bidang penanaman modal; bidang statistik; urusan komunikasi dan informatika dan urusan wajib bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Strategi pembangunan investasi dan perizinan tersebut menurut urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BPMPT Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Misi 1 : Meningkatkan fasilitasi dan koordinasi pelayanan penanaman modal dan perizinan untuk mendorong peningkatan investasi di Jawa Barat.



1) Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

Kebijakan :

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan penanaman modal dan perizinan yang memadai untuk mencapai SPM sesuai dengan alokasi anggaran, dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pemanjapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah;
- b. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh *stake holder*;
- c. Meningkatkan kinerja aparatur di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional;

2) Bidang Statistik

Kebijakan :

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis, dengan program sebagai berikut :

- a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

3) Bidang Penanaman Modal

Kebijakan :

Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis, dengan program sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi;
- b. Memberikan layanan informasi potensi, prosedur pelaksanaan penanaman modal kepada investor melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya.
- c. Melaksanakan pemusatan database untuk meningkatkan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal
- d. Memperjelas Tupoksi dari Tim *Taskforce* Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal sebagai pendukung Pelayanan Penanaman Modal



Misi 2 : Meningkatkan pelayanan penanaman modal dan perizinan yang cepat, tepat, akurat, transparan, normatif dan akuntabel untuk kepuasan masyarakat.

1) Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Kebijakan :

1. Meningkatkan kinerja aparatur di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional;
2. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi peluang investasi dan perizinan kewenangan Provinsi Jawa Barat selain digunakan untuk pemangku kepentingan dan juga digunakan sebagai alat perencanaan, pelayanan, pengendalian, dan pembinaan oleh OPD teknis terkait di Jawa Barat;
3. Menerapkan prosedur yang jelas dan meningkatkan standar mutu dalam pengelolaan pelayanan penanaman modal dan perizinan guna menciptakan transparansi dan menghindari terjadinya KKN;
4. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis;
5. Meningkatkan pengolahan informasi penanaman modal dan perizinan untuk kepentingan publik, dengan program-program sebagai berikut :
 - a. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur;
 - b. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah
6. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral ;
7. Memberikan layanan informasi perizinan kepada publik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya;
8. Menerapkan pola *online system* dalam upaya pendekatan pelayanan perizinan kepada masyarakat pemohon;
9. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan perizinan melalui penerapan sertifikasi ISO 9001-2008.
10. Melaksanakan sinergitas perizinan kewenangan Provinsi dengan OPD teknis terkait dan pemangku kepentingan.



11. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi pegawai dalam pelayanan perizinan.
12. Memperjelas Tupoksi dari Tim Teknis dari OPD terkait sebagai pendukung Perizinan Terpadu.

C. Prioritas Daerah

Prioritas Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada urusan wajib Bidang Penanaman Modal adalah Program Peningkatan Iklim, Promosi dan Kerjasama Investasi. Program tersebut untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran misi kedua Jawa Barat. Pada tahun anggaran 2015 urusan wajib di Bidang Penanaman Modal terdapat 7 kegiatan dari 1 program, dengan didukung 4 Urusan Wajib yaitu : Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan, Urusan Wajib Bidang Otonomi Daerah yang terdiri dari 7 program dan 14 kegiatan, Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika yang terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan serta Urusan Wajib Bidang Statistik yang terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan.

Urusan wajib Bidang Penanaman Modal

Kebijakan :

- Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi peluang investasi dan perizinan kewenangan Provinsi Jawa Barat selain digunakan untuk pemangku kepentingan dan juga digunakan sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian, dan pembinaan oleh OPD teknis terkait di Jawa Barat;
- Menerapkan prosedur yang jelas dan meningkatkan standar mutu dalam pengelolaan pelayanan penanaman modal dan perizinan guna menciptakan transparansi dan menghindari terjadinya KKN;
- Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan penanaman modal dan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis;
- Menciptakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu agar sesuai tuntutan dan kepentingan masyarakat;
- Meningkatkan pengolahan informasi penanaman modal dan perizinan untuk kepentingan publik



1. Program Peningkatan Iklim Investasi, Promosi dan Kerjasama Investasi

Sasaran :

Meningkatnya realisasi investasi PMA + PMDN di Jawa Barat.

Kegiatan :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal PMA/PMDN;
2. Penanganan Permasalahan Penanaman Modal di Jawa Barat;
3. Pelaksanaan Kerjasama Investasi;
4. Pengembangan Penanaman Modal;
5. Penyelenggaraan Promosi dan Kerjasama Investasi;
6. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Di Jawa Barat;
7. Publikasi Kawasan Geopark Ciletuh.

Urusan Wajib Bidang Statistik

2. Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Daerah

Sasaran :

Terpenuhinya data/informasi statistik daerah yang valid dan akuntabel untuk menunjang pembangunan daerah

Kegiatan :

Pengelolaan Data / Informasi dan Publikasi Perijinan / Non Perijinan di Jawa Barat.

Urusan Wajib Bidang Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

3. Program Pemanjapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah

Sasaran : terwujudnya pelayanan publik yang bermutu dan akuntabel di seluruh tingkatan pemerintahan daerah

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Verifikasi/Validasi, Visitasi Lapangan dan Administrasi/Teknis Perizinan;
2. Pemanjapan Kebijakan dan Sinergitas Stakeholders Perizinan;
3. Penyelenggaraan Layanan Perizinan Melalui SMS dan Gerai Wilayah Barat;
4. Penyelenggaraan Layanan Perizinan Melalui SMS dan Gerai Wilayah Timur;
5. Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pelayanan Perijinan Terpadu Jawa Barat



4. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur

Sasaran :

- a. Meningkatnya kinerja pegawai Provinsi Jawa Barat;
- b. Meningkatnya kompetensi pegawai Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan :

Peningkatan Kemampuan Aparatur pada BPMPT

5. Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur

Sasaran :

Meningkatnya jaminan kesejahteraan bagi aparatur Pemerintah Daerah.

Kegiatan :

Peningkatan Kesejahteraan Aparatur

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Sasaran :

Terpenuhinya kebutuhan dasar operasional unit kerja SKPD dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

Kegiatan :

Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran

7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran : tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah

Kegiatan :

Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor

8. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sasaran :

Terpeliharanya sarana dan prasarana operasional SKPD.

Kegiatan :

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

9. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

Sasaran :

Meningkatnya kinerja pengelola keuangan di lingkungan BPMPT Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan :

Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah



10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Sasaran :

- a. Meningkatnya pelaporan capaian kinerja pembangunan.
- b. Meningkatnya pengelolaan keuangan yang akurat, cepat, cermat dan berbasis IT.

Kegiatan :

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.

Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika

11. Program Pengembangan Komunikasi, informasi, media Massa dan pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran : meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat dan stakeholder penanaman modal dan perizinan.

Kegiatan :

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perizinan.

Urusan Wajib Bidang Perencanaan Pembangunan

12. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Sasaran : terwujudnya sinergi perencanaan Provinsi dengan Pusat dan Kabupaten/Kota.

Kegiatan :

Perencanaan dan Evaluasi Program/Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan.